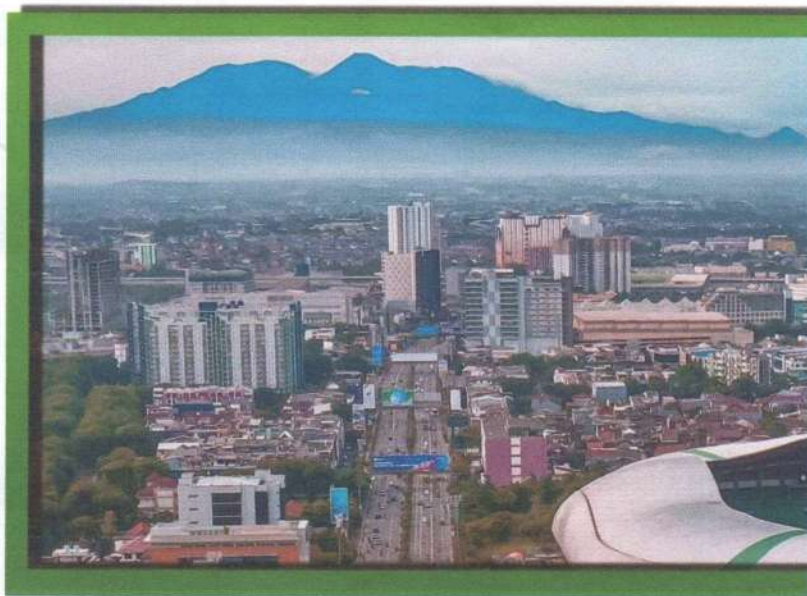




TAHUN ANGGARAN 2024 LAPORAN KEUANGAN

AUDITED



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia Nya, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi telah dapat disusun dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan ini disusun dengan berbasis akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Adapun jenis Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan tentang ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan;



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

2. Neraca menyajikan tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
3. Laporan Operasional menyajikan tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan tentang ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas (berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar) dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca dengan informasi yang disajikan didalamnya serta disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari Laporan Keuangan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami berharap tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini demi perbaikan kedepannya, sehingga laporan ini dapat dijadikan rekomendasi pengambilan kebijakan pimpinan. Laporan Keuangan ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Bekasi, 26 Mei 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah



Drs. Dinar Faizar Badar
NIP. 19710115 199003 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	halaman..... i
Daftar Isi	halaman.....ii
Daftar Tabel	halaman.....v
Daftar Lampiran	halaman.....vii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	halaman.....viii
Lembar Muka	

- I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional (LO)
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- V. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut;

Bab I	Pendahuluan	halaman..... 1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	halaman..... 2
	1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	halaman..... 6
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	halaman..... 7
	2.1. Profil dan Kebijakan Teknis	halaman..... 7
	2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	halaman.... 15
	2.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	halaman.... 38
	2.3.1. Hambatan dan Kendala Belanja Langsung Penunjang Urusan	halaman.... 38
	2.3.1. Hambatan dan Kendala Belanja Langsung Urusan	halaman... 39
Bab III	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	halaman... 42
	3.1. Basis Akuntansi	halaman... 42
	3.2. Dasar Pengukuran	halaman... 42
	3.3. Kebijakan Akuntansi	halaman... 43



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Bab IV	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan	halaman....62
4.1.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	halaman....62
4.1A.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	halaman....62
4.1A.1.	Belanja LRA	halaman....62
4.1A.1.1.	Belanja Operasi-LRA	halaman....63
4.1A.1.1.1.	Belanja Pegawai	halaman....64
4.1A.1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	halaman....65
4.1A.1.2.	Belanja Modal-LRA	halaman....69
4.1A.1.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	halaman....69
4.1A.2.	Surplus (Defisit) LRA	halaman...70
4.2.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	halaman....70
4.2.1.	Aset	halaman....70
4.2.1.1.	Aset Lancar	halaman....71
4.2.1.1.1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	halaman....71
4.2.1.1.2.	Persediaan	halaman....71
4.2.1.2.	Aset Tetap	halaman....79
4.2.1.2.1.	Peralatan dan Mesin	halaman....80
4.2.1.2.2.	Gedung dan Bangunan	halaman....82
4.2.1.2.3.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	halaman....82
4.2.1.2.4.	Aset Tetap Lainnya	halaman....83
4.2.1.2.5.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	halaman....83
4.2.1.3.	Aset Lainnya	halaman....84
4.2.1.3.1.	Aset Tidak Berwujud	halaman....85
4.2.1.3.2.	Aset Lain-Lain..	halaman....85
4.2.1.3.3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	halaman....85
4.2.1.3.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	halaman....86
4.2.2.	Kewajiban	halaman....86
4.2.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	halaman....87
4.2.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	halaman....87



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.2.3. Ekuitas	halaman....87
4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	halaman....87
4.3.1. Pendapatan-LO	halaman....88
4.3.2. Beban-LO	halaman....88
4.3.2.1. Beban Operasi-LO	halaman....88
4.3.2.1.1. Beban Pegawai-LO	halaman....89
4.3.2.1.2. Beban Persediaan-LO	halaman....90
4.3.2.1.3. Beban Jasa-LO	halaman....93
4.3.2.1.4. Beban Barang-LO	halaman....96
4.3.2.1.5. Beban Pemeliharaan-LO	halaman....97
4.3.2.1.6. Beban Perjalanan Dinas-LO	halaman....98
4.3.2.1.7. Beban Penyusutan-LO	halaman....99
4.3.2.1.8. Beban Amortisasi-LO	halaman..100
4.3.3. Surplus/Defisit- LO	halaman..101
4.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	halaman..101
4.4.1. Ekuitas Awal	halaman..101
4.4.2. Surplus/Defisit-LO	halaman..101
4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	halaman..101
4.4.4. Ekuitas Akhir	halaman..105
Bab V Penjelasan Penting Lainnya	halaman..106
5.1. Perubahan Struktur Kepemimpinan Atau Kelembagaan	halaman..106
5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan	halaman..106
5.3. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan	halaman..106
Bab VI Penutup	halaman..107
Lampiran-lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jabatan dan Pemangku Jabatan	halaman..... 11
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	halaman..... 12
Tabel 2.3	Diagram Menurut Golongan	halaman..... 12
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Eselon	halaman..... 13
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	halaman..... 13
	Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi TA. 2024	halaman..... 14
Tabel 2.6	Daftar Rincian Belanja Parsial	halaman..... 16
Tabel 2.7	Daftar Sub Kegiatan setelah Perubahan APBD	halaman..... 18
Tabel 2.8	Daftar Belanja setelah Perubahan APBD	halaman.....29
Tabel 2.9	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Anggaran	halaman.....31
Tabel 2.10	Pencapaian Target Kinerja Keuangan	halaman.....32
Tabel 2.11	Diagram Realisasi Anggaran	halaman.....38
Tabel 2.12	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target (BLPU)	halaman.....38
Tabel 2.13	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target (BLU)	halaman.....39
Tabel 4.1	Belanja-LRA	halaman..... 62
Tabel 4.2	Diagram Belanja-LRA	halaman..... 63
Tabel 4.3	Belanja Operasi-LRA	halaman..... 63
Tabel 4.4	Belanja Pegawai-LRA	halaman..... 64
Tabel 4.5	Rekapitulasi Pengembalian Belanja Pegawai	halaman..... 65
Tabel 4.6	Belanja Barang dan Jasa	halaman..... 65
Tabel 4.7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	halaman.....69
Tabel 4.8	Rekapitulasi Aset	halaman..... 70
Tabel 4.9	Persediaan per Jenis	halaman..... 71
Tabel 4.10	Kondisi Barang Per Jenis Rekening Persediaan	halaman..... 72
Tabel 4.11	Belanja Barang Yang Tidak Menjadi Persediaan	halaman..... 75
Tabel 4.12	Reklasifikasi Barang Persediaan Ke Non Persediaan	halaman..... 75
Tabel 4.13	Reklasifikasi Antar Persediaan	halaman..... 79
Tabel 4.14	Aset Tetap	halaman..... 79
Tabel 4.15	Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	halaman..... 80
Tabel 4.16	Peralatan dan Mesin	halaman..... 80
Tabel 4.17	Aset Gedung dan Bangunan	halaman..... 82
Tabel 4.18	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	halaman..... 83
Tabel 4.19	Aset Tetap Lainnya	halaman..... 83
Tabel 4.20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	halaman..... 84
Tabel 4.21	Aset Lainnya	halaman..... 84
Tabel 4.22	Rincian Aset Tak Berwujud	halaman..... 85
Tabel 4.23	Rincian Aset Lain-Lain	halaman..... 85
Tabel 4.24	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	halaman..... 86
Tabel 4.25	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	halaman..... 86



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.26	Beban Pegawai-LO	halaman.....89
Tabel 4.27	Beban Persediaan-LO	halaman.....90
Tabel 4.28	Rician Perhitungan Beban Persediaan-LO	halaman.....91
Tabel 4.29	Beban Jasa-LO	halaman.....93
Tabel 4.30	Rician Perhitungan Beban Jasa-LO	halaman.....94
Tabel 4.31	Beban Barang-LO	halaman.....96
Tabel 4.32	Rincian Perhitungan Beban Barang-LO	halaman.....96
Tabel 4.33	Beban Pemeliharaan-LO	halaman.....97
Tabel 4.34	Rician Perhitungan Beban Pemeliharaan-LO	halaman.....98
Tabel 4.35	Beban Perjalanan Dinas-LO per jenis	halaman.....99
Tabel 4.36	Rincian Perhitungan Beban Perjalanan Dinas	halaman.....99
Tabel 4.37	Beban Penyusutan-LO per jenis	halaman....100
Tabel 4.38	Beban Amortisasi-LO per jenis	halaman....100
Tabel 4.39	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	halaman....102
Tabel 4.40	Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar	halaman....102



DAFTAR LAMPIRAN

1. Prosedur Analitis dan Eviden Prosedur Analitis
2. Rekening Koran
3. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Daftar Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Piutang)
5. Daftar Belanja Dibayar Dimuka
6. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
7. Daftar Utang Belanja
8. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya
9. Daftar Utang Belanja (Kewajiban Jangka Pendek)
10. Daftar Jasa Konsultasi (DED)
11. Daftar Kajian
12. Daftar STS (bend 17)
13. Daftar Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal
14. Daftar Pengembalian Setoran Sisa UP
15. Daftar Belanja Masih Harus Dibayar/Utang Beban Telepon
16. Daftar Belanja Masih Harus Dibayar/Utang Beban Internet
17. Rekap Pengembalian Sisa TU (Tambah Uang)
18. Daftar Belanja Masih Harus Dibayar/Utang Belanja
19. Surat Pemberitahuan Jurnal Reklasifikasi
20. Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Awal
21. Berita Acara Rekonsiliasi Kas
22. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah
23. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan
24. Berita Acara Rekonsiliasi Stock Opname Persediaan dan Lampiran
25. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya dan Lampiran
26. Data Pemutakhiran Penyusutan Aset
27. Laporan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
28. Berita Acara Serah Terima Barang Masuk/Keluar



SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Tahun Anggaran 2024.

Kami Bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan tentang Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

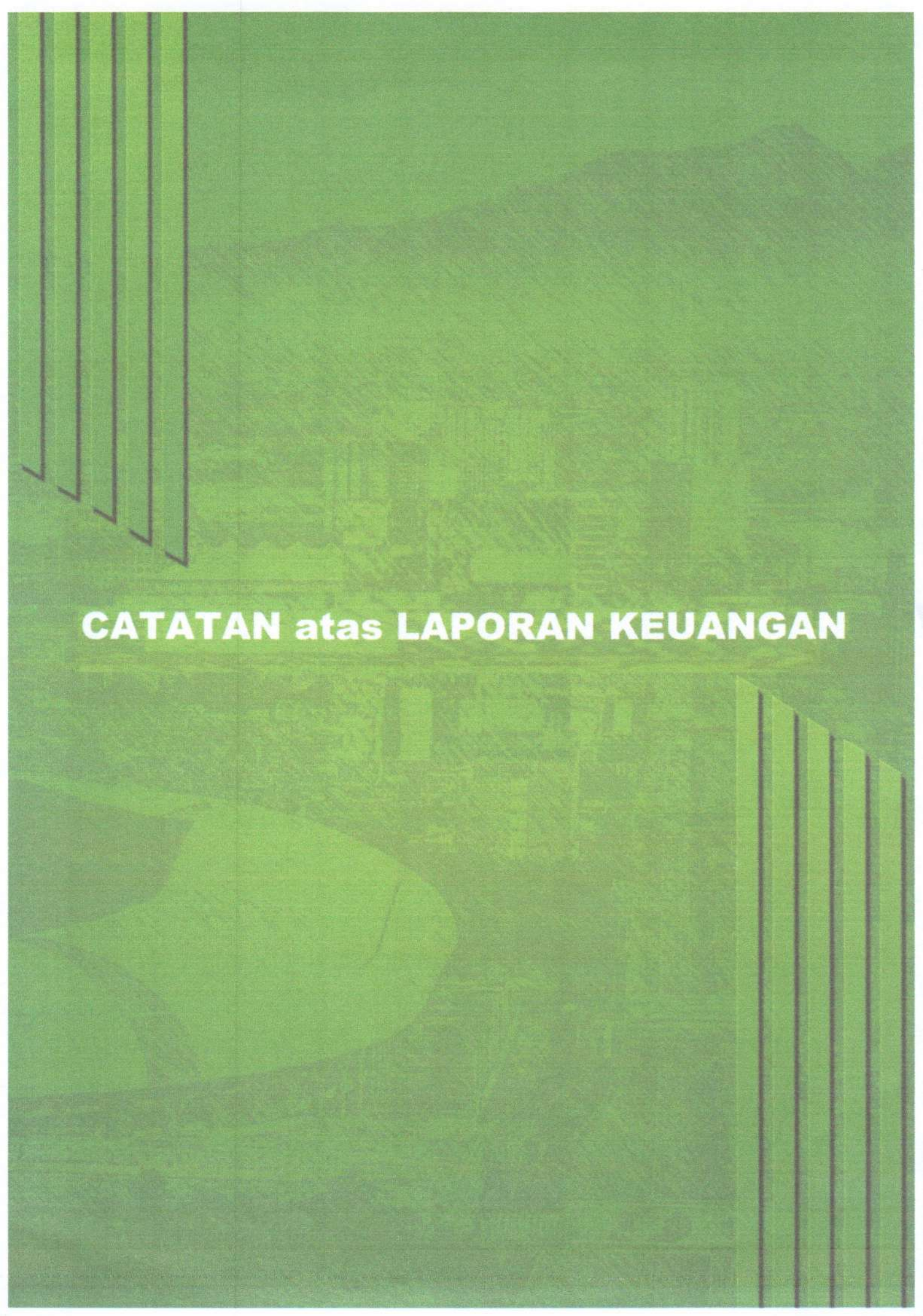
Demikianlah pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 Mei 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah



Drs. Dinar Faizar Badar
NIP. 19710115 199003 1 002



CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2024, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, serta membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Kota



Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024

Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut; dan

5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Anggaran, Belanja, Surplus/Defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 05 Seri E);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 57);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 61);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 14);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pelaporan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 42).



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	
	1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3.	Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	2.1.	Profil dan Kebijakan Teknis
	2.2.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.3.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
	3.1	Basis Akuntansi
	3.2	Dasar Pengukuran
	3.3	Kebijakan Akuntansi
Bab IV	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
	4.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
	4.2.	Penjelasan Neraca
	4.3.	Penjelasan Laporan Operasional
	4.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab V	Penjelasan Penting Lainnya	
Bab VI	Penutup	
Lampiran-Lampiran		



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D), serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta memonitoring setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan



Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi Badan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- c. Pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan;
- d. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Wali Kota;
- e. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada instansi vertikal di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 5 (lima) bidang yaitu: Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbang dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbang dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- n. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;



- r. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- s. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- u. pembinaan administrasi perkantoran;
- v. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- w. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- x. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- y. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yaitu meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kearsipan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Inspektorat. Sedangkan bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta bidang Litbang meliputi seluruh Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Susunan Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1
DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN
Per 31 Desember 2024

URAIAN JABATAN	PEMANGKU JABATAN
Kepala Badan	: Drs. DINAR FAIZAL BADAR
Sekretaris Badan	: Dra. LUSI SILAWATI, M.Si
Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	: SELAMET GUNAWAN, NST,AP.,S.Sos.,M.A.
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	: YANKA PERKASA, SE.
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	: HELMY,A.Md.LLAJ, SE
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	: BOBBY YUSTIAN, AP.,S.Ip
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	: YEYEN KUSMIATI, S.Sos.,M.Si
Jabatan Fungsional Tertentu	: RESA HESTIANA, SH.,M.Si
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: YAN YAN SUYATNA, SH
Kepala Sub Bagian Keuangan	: IRMA MARTIANA POEDJAWATI, S.Ip.,M.Si
Jabatan Fungsional Tertentu	: DEDE HENDRIYANA, ST
Jabatan Fungsional Tertentu	: UCI YUSKANDAR, S.Sos
Jabatan Fungsional Tertentu	: Ir. ABRIYANY, MT
Jabatan Fungsional Tertentu	: MOHAMAD ALWI, S.STP.,M.Si
Jabatan Fungsional Tertentu	: KUSUMANING HEDYWATI, S.STP.,M.AP



URAIAN JABATAN		PEMANGKU JABATAN
Jabatan Fungsional Tertentu	:	MARJONO M NOER, S.Sos.,MM
Jabatan Fungsional Tertentu	:	SUGANDA,M.Si
Jabatan Fungsional Tertentu	:	YOWALDI,S.T.
Jabatan Fungsional Tertentu	:	ENDANG SRI RINAPRATAMI, S.T.,ME
Jabatan Fungsional Tertentu	:	MUSTOPA BASRI,S.H.
Jabatan Fungsional Tertentu	:	VEVI MARFIATI ARIEF,S.E.,M.M.

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappedalitbangda Kota Bekasi

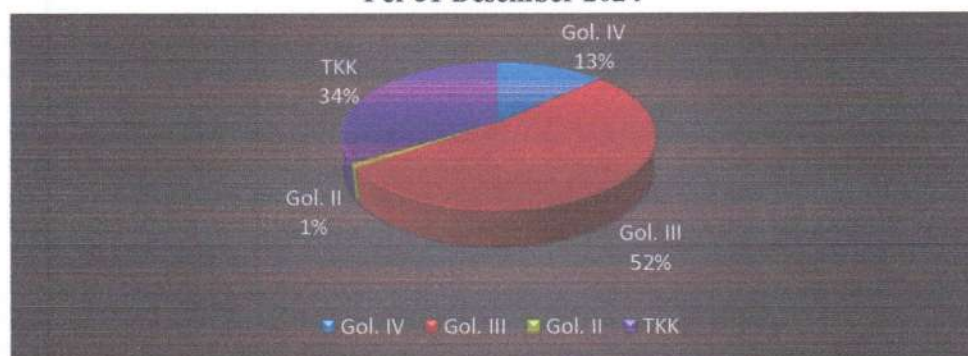
Kondisi Pegawai per 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN
Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	15	L = 8 P = 7
Golongan III	59	L = 32 P = 27
Golongan II	1	L = 0 P = 1
TKK	38	L = 23 P = 15
Jumlah	113	L = 63 P = 50

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi

Tabel 2.3
DIAGRAM BERDASARKAN GOLONGAN
Per 31 Desember 2024





Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON
Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II.b	1	L = 1 P = 0
Eselon III.a	1	L = 0 P = 1
Eselon III.b	5	L = 4 P = 1
Eselon IV.a	2	L = 1 P = 1
Jumlah	9	L = 6 P = 3

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi

Tabel 2.5
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
Per 31 Desember 2024

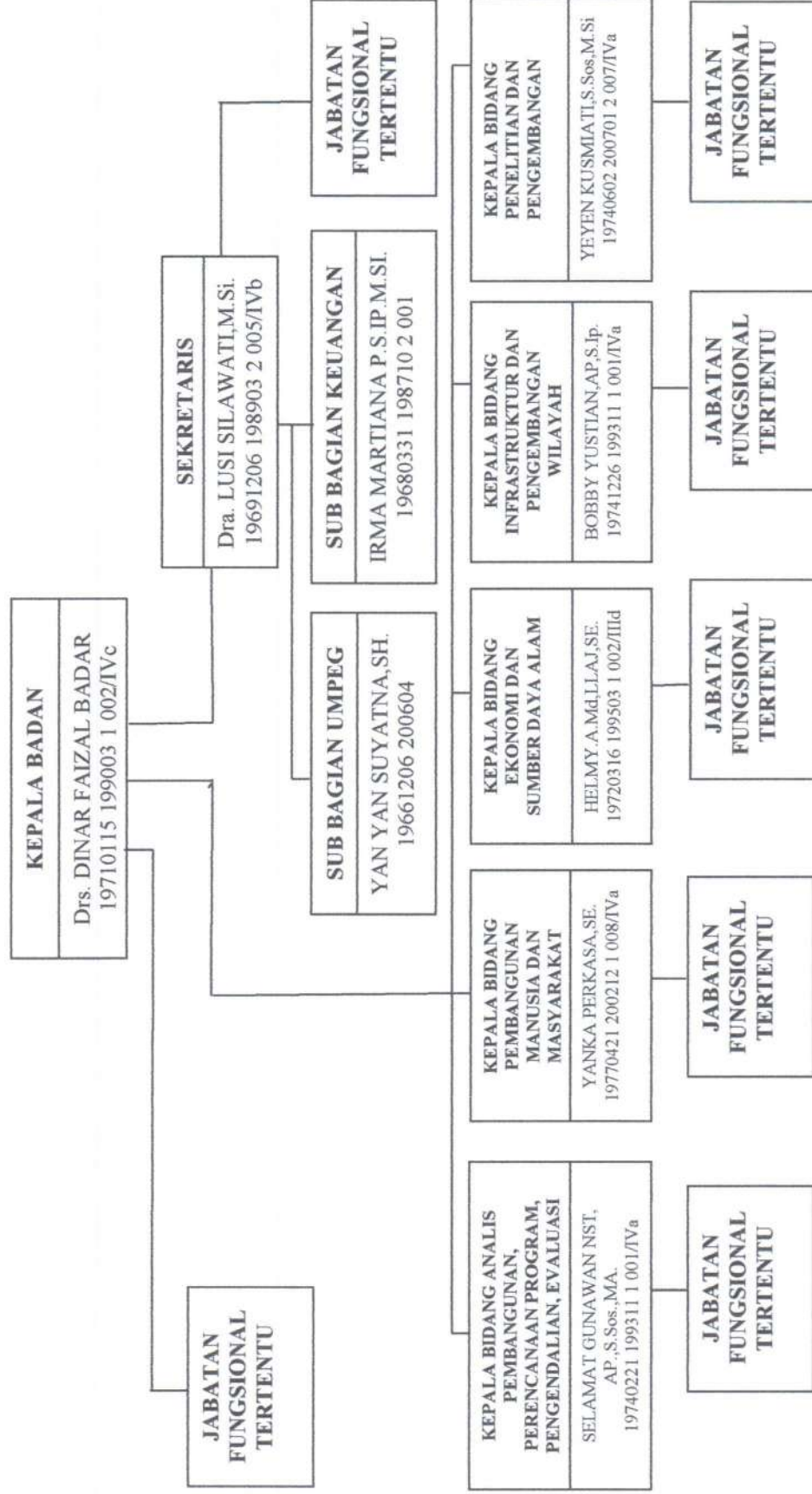
URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S2	29	27	2
S1	61	42	19
D4	2	2	0
D 3	9	4	5
SLTA	11	1	10
SMP	1	0	1
Jumlah	113	76	37

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI





2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ke pemerintahannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pengelolaan belanja daerah tersebut harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB) dan kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melalui APBD Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp32.475.464.220,00 dengan rincian belanja pegawai Rp20.347.535.000,00, barang dan jasa Rp11.640.389.220,00 dan belanja modal sebesar Rp487.540.000,00, dialokasikan untuk membiayai beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pagu Anggaran Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mengalami perubahan Parsial dan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan Pagu Anggaran Murni sebagai berikut;

1. Perubahan Parsial Semester 1 Tahun Anggaran 2024

Pagu Anggaran Murni Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sampai dengan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. selain mengalami pergeseran pagu anggaran/Parsial juga terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 yang bersumber dari Dana Bantuan DKI Jakarta yaitu pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Perubahan Parsial Semester 1 Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Rincian Belanja Parsial
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN ANGGARAN		
			PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3
5.1	Belanja Operasi				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.275.903.000,00	0,00	4.245.893.000,00	0,00
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.128.000,00	0,00	35.128.000,00	0,00
5.1.1.01.08.0001	Pembulatan Gaji PNS	53.000,00	0,00	63.000,00	0,00
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	6.236.659.000,00	0,00	11.151.823.000,00	0,00
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.922.164.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.07.0001	Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	37.700.000,00	0,00	42.700.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	23.400.000,00	0,00	25.400.000,00	0,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	100.325.000,00	0,00	118.700.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	301.059.000,00	0,00	354.035.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396.984.000,00	0,00	384.472.000,00	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN ANGGARAN		
			PARSIAL 1	PARSIAL 2	PARSIAL 3
5.1.2.01.01.0004	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	68.800.000,00	0,00	140.900.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	637.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	53.260.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	184.800.000,00	0,00	131.400.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	20.396.000,00	0,00	21.923.000,00	0,00
5.1.2.02.09.0003	Belanja Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	85.000.000,00	0,00	151.750.000,00	0,00
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148.960.000,00	0,00	173.840.000,00	0,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	183.010.000,00	0,00	261.780.000,00	0,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.875.000,00	0,00	51.100.000,00	0,00

2. Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2024.

Pagu Anggaran Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi terdapat perubahan anggaran berupa penambahan atau pengurangan anggaran dari Pagu Murni sebesar Rp32.605.152.520,00 menjadi Rp32.475.464.220,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 2.7
Daftar Sub Kegiatan setelah Perubahan APBD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
1	5.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.097.535.000,00	20.347.535.000,00
	5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	4.275.903.000,00	4.245.893.000,00
	5.1.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	386.913.000,00	386.913.000,00
	5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	340.911.000,00	340.911.000,00
	5.1.1.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.105.155.000,00	605.155.000,00
	5.1.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.051.000,00	90.051.000,00
	5.1.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	246.555.000,00	246.555.000,00
	5.1.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.128.000,00	35.128.000,00
	5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.000,00	63.000,00
	5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.236.659.000,00	10.901.823.000,00
	5.1.1.15.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.922.164.000,00	0,00
	5.1.1.17.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.426.943.000,00	3.426.943.000,00
	5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	37.700.000,00	42.700.000,00
	5.1.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	23.400.000,00	25.400.000,00
2	5.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	20.500.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.705.000,00	10.205.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.295.000,00	10.295.000,00
3	5.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	20.500.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.705.000,00	10.205.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.295.000,00	10.295.000,00
4	5.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
5	5.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000,00	280.000.000,00
	5.2.1.1.12	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	105.000.000,00	280.000.000,00
6	5.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	735.000,00	735.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.922.000,00	2.238.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.200.000,00	14.400.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	227.000,00	227.000,00
	5.2.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000,00	7.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.720.000,00	1.720.000,00
	5.2.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179.196.000,00	173.680.000,00
7	5.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.327.400,00	52.327.400,00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	43.423.000,00	43.423.000,00
	5.2.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.816.000,00	3.816.000,00
	5.2.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	240.038.000,00	240.038.000,00
	5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.968.000,00	1.968.000,00
	5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.753.600,00	1.753.600,00
	5.2.1.01.43	Belanja Natura dan Pakan Natura	56.674.000,00	56.674.000,00
8	5.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	138.146.000,00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.470.000,00	12.470.000,00
	5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	18.610.000,00	18.610.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	168.920.000,00	107.066.000,00
9	5.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	56.000.000,00
	5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	56.000.000,00
10	5.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00
	5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00
11	5.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	700.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	72.000.000,00	72.000.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.500.000,00	100.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	30.000.000,00	30.000.000,00
	5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	498.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	324.500.000,00	475.050.000,00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	22.950.000,00
12	5.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00
13	5.2.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	100.000.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	100.000.000,00
14	5.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	300.000.000,00
	5.2.05.01.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00
	5.2.05.02.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	100.000.000,00
	5.2.10.01.02	Belanja Modal Personal Computer	175.000.000,00	175.000.000,00
15	5.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.000.000,00	0,00
	5.2.02.01.04	Belanja Modal Penyimpanan Perlengkapan Kantor	62.000.000,00	0,00
16	5.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	20.000.000,00
	5.2.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	2.000.000,00
	5.2.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.000.000,00	18.000.000,00
17	5.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.020.720,00	1.917.020.720,00
	5.2.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.739.400.000,00	1.811.875.000,00
	5.2.1.04.28	Tunjangan Hari Raya	74.975.000,00	0,00
18	5.2.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.240.000,00	95.740.000,00
	5.2.1.05.06	Belanj Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non PNS	4.180.320,00	4.180.320,00
	5.2.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.225.400,00	5.225.400,00
19	5.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	260.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.000.000,00	170.000.000,00
	5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000,00	50.000.000,00
	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	30.000.000,00	15.000.000,00
	5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	25.000.000,00
	5.2.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	25.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
20	5.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	270.000.000,00
	5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	190.000.000,00	190.000.000,00
	5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	50.000.000,00	20.000.000,00
	5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	60.000.000,00
	5.2.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.000.000,00	50.000.000,00
	5.2.1.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	10.000.000,00
21	5.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	120.000.000,00
	5.2.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal Computer	35.000.000,00	73.000.000,00
	5.2.1.19.09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	47.000.000,00
22	5.2.15.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.640.000,00	12.640.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.519.000,00	33.519.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.010.000,00	22.010.000,00
	5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	240.000,00	240.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	7.600.000,00	7.600.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	217.050.000,00	217.050.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.651.000,00	2.651.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.370.000,00	32.370.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.920.000,00	1.920.000,00
23	5.2.15.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	600.000.000,00	570.684.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.230.000,00	0,00
	5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.900.000,00	27.900.000,00
	5.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	74.700.000,00	74.700.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.829.000,00	14.194.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.270.000,00	14.270.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	32.800.000,00	20.800.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	198.000.000,00	198.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	198.000.000,00	198.000.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	4.086.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.260.000,00	1.920.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	182.050.000,00	218.900.000,00
	5.2.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.875.000,00	0,00
24	5.2.15.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.428.715.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.375.000,00	33.225.000,00
	5.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	99.600.000,00	99.600.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.685.000,00	223.345.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.800.000,00	28.400.000,00
	5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.500.000,00	1.750.000,00
	5.2.1.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	33.800.000,00	8.800.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	336.750.000,00	336.750.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	53.260.000,00	160.000.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	13.630.000,00	9.065.000,00
	5.2.1.12.01	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	300.000.000,00	300.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.500.000,00	68.150.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	164.100.000,00	159.630.000,00
25	5.2.16.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.430.000,00	261.430.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.895.000,00	10.495.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00	28.400.000,00
	5.2.1.01.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	207.000.000,00	207.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.220.000,00	11.220.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.940.000,00	2.940.000,00
	5.2.1.01.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.375.000,00	1.375.000,00
26	5.2.17.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	1.400.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.200.000,00	14.910.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.550.000,00	73.418.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.600.000,00	114.710.000,00
	5.2.1.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000,00	29.100.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.01.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	274.800.000,00	184.800.000,00
	5.2.1.01.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.300.000,00	3.912.000,00
	5.2.2.09.03	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	151.750.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.200.000,00	77.620.000,00
	5.2.1.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	18.800.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	950.000,00	42.880.000,00
	5.2.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	51.100.000,00
27	5.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100.000.000,00	59.665.500,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alsat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.677.000,00	9.997.500,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.395.000,00	7.100.000,00
	5.2.1.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	6.000.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.800.000,00	5.400.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.560.000,00	19.560.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.365.000,00	8.635.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.920.000,00	960.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.283.000,00	2.283.000,00
28	5.2.21.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.510.000,00	6.510.000,00
	5.2.1.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	22.560.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alsat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.263.000,00	13.593.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.495.000,00	525.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	24.400.000,00	24.400.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.602.000,00	1.602.000,00
	5.2.1.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	14.000.000,00
	5.2.1.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.690.000,00	15.690.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.920.000,00	0,00
	5.2.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	201.120.000,00	201.120.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
29	5.2.18.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	542.400.000,00	392.396.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.565.000,00	21.865.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.750.000,00	0,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.759.000,00	5.115.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.152.000,00	62.810.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	14.800.000,00	7.600.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	184.800.000,00	0,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	5.404.000,00	5.756.000,00
	5.2.1.09.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	85.000.000,00	221.120.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.530.000,00	67.170.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.640.000,00	960.000,00
30	5.2.18.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102.690.000,00	90.530.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.170.000,00	1.085.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.686.000,00	4.986.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.300.000	79.384.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,00	0,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	934.000,00	275.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	4.800.000,00
31	5.2.18.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	62.076.800,00	0,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.450.000,00	0,00
	5.2.1.01.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.750.000,00	0,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	604.800,00	0,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.970.000,00	0,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.702.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
32	5.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hasmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000,00	50.452.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.930.000,00	4.410.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.996.000,00	3.916.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.744.000,00	18.744.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.960.000,00	1.362.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.710.000,00	10.320.000,00
	5.2.1.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.960.000,00	0,00
33	5.2.19.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000,00	75.604.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.440.000,00	4.340.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.770.000,00	6.169.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.870.000,00	48.635.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	2.325.000,00	1.100.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.595.000,00	15.360.000,00
34	5.2.19.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100.000.000,00	44.270.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.548.000,00	12.300.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.734.000,00	4.970.000,00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.800.000,00	
	5.2.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	0,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.750.000,00	0,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	288.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.420.000,00	0,00
	5.2.1.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	27.000.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.060.000,00	0,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000,00	0,00
35	5.2.20.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.000.000,00	225.114.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.275.000,00	13.670.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.247.000,00	2.247.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.135.000,00	7.085.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	5.043.000,00	3.412.000,00
	5.2.1.12.01	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000,00	160.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.300.000,00	38.700.000,00
36	5.2.20.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100.000.000,00	80.650.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.340.000,00	1.435.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.440.000,00	5.350.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.800.000,00	65.462.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.100.000,00	323.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.320.000,00	8.080.000,00
37	5.2.20.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	350.000.000,00	128.324.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.275.000,00	5.425.000,00
	5.2.1.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	700.000,00	350.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.179.000,00	5.719.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.050.000,00	14.200.000,00
	5.2.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	23.385.000,00	23.385.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	121.800.000,00	0,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.901.000,00	1.645.000,00
	5.2.1.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	9.600.000,00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.250.000,00	68.000.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00
	5.2.1.01.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106.860.000,00	0,00
38	5.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Hasmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	350.000.000,00	452.928.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.510.000,00	6.510.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	700.000,00	700.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.665.000,00	5.788.000,00
	5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000,00	65.148.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00
	5.2.1.01.20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	14.000.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	129.900.000,00	46.200.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	90.000.000,00
	5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.872.000,00	1.702.000,00
	5.2.1.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	0,00
	5.2.1.05.43	Belanja Sewa Hotel	49.518.000,00	0,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.590.000,00	57.590.000,00
	5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	115.800.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.445.000,00	44.090.000,00
39	5.2.15.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000,00	150.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.135.000,00	2.135.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.095.000,00	17.095.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	11.400.000,00	11.400.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.650.000,00	7.650.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.720.000,00	1.720.000,00
40	5.2.01.032	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.485.000,00	2.485.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.895.000,00	8.895.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.200.000,00	16.200.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.240.000,00	9.240.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.180.000,00	3.180.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
41	5.2.16.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.870.000,00	2.870.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.490.000,00	10.490.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95.000.000,00	95.000.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.940.000,00	8.940.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.900.000,00	1.900.000,00
42	5.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000,00	150.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	700.000,00	700.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00
	5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	93.900.000,00	93.900.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.180.000,00	3.180.000,00
	5.2.10.01.02	Belanja Modal Personal Computer	51.000.000,00	51.000.000,00
43	5.2.18.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000,00	380.000.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.515.000,00	5.515.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.685.000,00	5.685.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	19.500.000,00	19.500.000,00
	5.2.1.04.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.500.000,00	37.500.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	111.020.000,00	111.020.000,00
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.220.000,00	15.220.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.480.000,00	26.480.000,00
	5.2.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	159.080.000,00	159.080.000,00
44	5.2.18.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	350.000.000,00	350.000.000,00
	5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.180.000,00	4.180.000,00
	5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.448.000,00	2.448.000,00
	5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.800.000,00	16.800.000,00
	5.2.1.04.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.500.000,00	37.500.000,00
	5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	90.000.000,00	90.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO	KODE SUB KEGIATAN/ KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI APBD	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
			Rp	Rp
	5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.360.000,00	15.360.000,00
	5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.708.000,00	36.708.000,00
	5.2.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.464.000,00	10.464.000,00
	5.2.1.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.660.000,00	23.660.000,00
	5.2.10.01.02	Belanja Modal Personal Computer	112.880.000,00	112.880.000,00
JUMLAH			32.605.152.520,00	32.475.464.220,00

Tabel 2.8
Daftar Belanja setelah Perubahan APBD
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
		Rp	Rp
5	Belanja Daerah	33.605.152.520,00	32.475.464.220,00
5.1	Belanja Operasi	33.155.612.520,00	31.987.924.220,00
5.1.1	Belanja Pegawai	21.097.535.000,00	20.347.535.000,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	4.245.893.000,00	4.245.893.000,00
5.1.1.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	386.913.000,00	386.913.000,00
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	340.911.000,00	340.911.000,00
5.1.1.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.105.155.000,00	605.155.000,00
5.1.1.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.051.000,00	90.051.000,00
5.1.1.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	246.555.000,00	246.555.000,00
5.1.1.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.128.000,00	35.128.000,00
5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.000,00	63.000,00
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.151.823.000,00	10.901.823.000,00
5.1.1.17.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.426.943.000,00	3.426.943.000,00
5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.700.000,00	42.700.000,00
5.1.1.25.02	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.400.000,00	25.400.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.058.077.520,00	11.640.389.220,00
5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	456.440.000,00	398.120.000,00
5.2.1.01.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	290.000.000,00	240.000.000,00
5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.697.400,00	132.697.400,00
5.2.1.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	62.033.000,00	62.033.000,00
5.2.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.816.000,00	3.816.000,00
5.2.1.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	11.900.000,00	1.050.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
		Rp	Rp
5.2.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	240.038.000,00	240.038.000,00
5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.968.000,00	1.968.000,00
5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.753.600,00	1.753.600,00
5.2.1.01.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	174.300.000,00	196.860.000,00
5.2.1.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	687.398.800,00	620.528.500,00
5.2.1.01.43	Belanja Natura dan Pakan Natura	56.674.000,00	56.674.000,00
5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	869.405.000,00	702.443.000,00
5.2.1.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	54.740.000,00	51.990.000,00
5.2.1.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.385.000,00	23.385.000,00
5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	260.500.000,00	201.800.000,00
5.2.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	637.000.000,00	637.000.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	14.000.000,00
5.2.1.04.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.814.375.000,00	1.811.875.000,00
5.2.1.04.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.683.200.000,00	1.460.700.000,00
5.2.1.04.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	75.000.000,00	75.000.000,00
5.2.1.04.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	708.293.000,00	709.020.000,00
5.2.1.04.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	82.272.000,00	66.690.000,00
5.2.1.04.59	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	2.000.000,00
5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	56.000.000,00
5.2.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.000.000,00	18.000.000,00
5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	80.000.000,00	35.000.000,00
5.2.1.05.05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	93.240.000,00	95.740.000,00
5.2.1.05.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.180.320,00	4.180.320,00
5.2.1.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.225.400,00	5.225.400,00
5.2.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	21.000.000,00
5.2.1.08.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	32.000.000,00	6.000.000,00
5.2.1.11.03	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	151.750.000,00	151.750.000,00
5.2.1.11.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	603.120.000,00	681.120.000,00
5.2.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	105.000.000,00	280.000.000,00
5.2.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.000.000,00	75.000.000,00
5.2.3.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.1.19.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.000.000,00	73.000.000,00
5.2.1.19.09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	47.000.000,00
5.2.1.23.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	924.555.000,00	974.510.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU MURNI	PAGU SETELAH PERUBAHAN APBD
		Rp	Rp
5.2.1.23.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	220.450.000,00	260.650.000,00
5.2.1.23.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	639.408.000,00	539.328.000,00
5.2.1.23.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	431.416.000,00	425.900.000,00
5.2.1.25.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	169.544.000,00	169.544.000,00
5.2.2	Belanja Modal	449.540.000,00	487.540.000,00
5.2.3.14.01	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	62.000.000,00	0,00
5.2.3.14.04	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00
5.2.5.02.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	100.000.000,00
5.2.3.14.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.660.000,00	23.660.000,00
5.2.3.31.02	Belanja Modal Personal Computer	338.880.000,00	338.880.000,00

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 melalui APBD Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp32.475.464.220,00 yang dijabarkan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 tersebut adalah sebesar Rp29.784.439.496,00 atau sebesar 91,71% dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024			Per 31 Desember 2023		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
5.1	Belanja Tidak Langsung	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	21.249.534.000,00	18.466.420.178,00	86,90
5.1.1	Belanja Pegawai	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	21.249.534.000,00	18.466.420.178,00	86,90
5.2	Belanja Langsung	12.127.929.220,00	10.471.445.888,00	86,34	13.181.328.820,00	11.702.985.072,00	88,78
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	11.640.389.220,00	9.989.972.638,00	85,82	12.658.196.820,00	11.195.950.072,00	88,45
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.540.000,00	481.473.250,00	98,76	523.132.000,00	507.035.000,00	96,92
Surplus/ (Defisit) LRA			(29.784.439.496,00)		Surplus/ (Defisit) LRA	(30.169.405.250,00)	
SILPA			(29.784.439.496,00)		SILPA	(30.169.405.250,00)	

Sumber Data : SIPD Kota Bekasi



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 2.10
PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	1.034.541.392,00

Sumber Data : SIPD Kota Bekasi

II. BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG URUSAN

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.500.000,00	20.309.615,00	99,07	190.385,00
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.500.000,00	20.267.115,00	98,86	232.885,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.587.502,00	97,25	412.498,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.000.000,00	280.000.000,00	100	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	187.040.000,00	93,52	12.960.000,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000,00	324.739.000,00	81,18	75.261.000,00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.146.000,00	119.290.930,00	86,35	18.855.070,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	56.000.000,00	56.000.000,00	100	0,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	25.130.000,00	50,26	24.870.000,00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.000.000,00	618.404.933,00	88,34	81.595.067,00
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	1.000.000,00
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00	95.460.000,00	95,46	4.540.000,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	296.473.250,00	98,82	3.526.750,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	10.295.393,00	51,48	9.704.607,00
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.917.020.720,00	1.896.725.197,00	98,94	20.295.523,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000,00	170.093.013,00	65,42	89.906.987,00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000,00	209.871.900,00	77,73	60.128.100,00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000,00	114.350.000,00	95,29	5.650.000,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000,00	235.203.200,00	71,27	94.796.800,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	570.684.000,00	559.805.600,00	98,09	10.878.400,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.428.715.000,00	1.324.866.120,00	92,73	103.848.880,00
5.01.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
5.01.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000,00	146.312.730,00	97,54	3.687.270,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000,00	147.633.644,00	98,42	2.366.356,00
5.01.02.2.01.12	Pengolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000,00	149.319.280,00	99,55	680.720,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	261.430.000,00	220.544.164,00	84,36	40.885.836,00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD	59.665.500,00	16.695.609,00	27,98	42.969.891,00
5.01.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
5.01.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	150.000.000,00	147.557.806,00	98,37	2.442.194,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000,00	754.393.480,00	53,89	645.606.520,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	244.932.746,00	81,64	55.067.254,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
5.01.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	380.000.000,00	373.554.239,00	98,30	6.445.761,00
5.01.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	350.000.000,00	345.362.027,00	98,67	4.637.973,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	392.396.000,00	319.799.750,00	81,50	72.596.250,00
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.530.000,00	67.213.600,00	74,24	23.316.400,00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.452.000,00	45.509.900,00	90,20	4.942.100,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		SISA ANGGARAN (Rp)
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225.114.000,00	191.007.995,00	84,85	34.106.005,00
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.604.000,00	58.084.550,00	76,83	17.519.450,00
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.270.000,00	39.169.500,00	88,48	5.100.500,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	80.650.000,00	78.912.000,00	97,85	1.738.000,00
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	128.324.000,00	117.651.700,00	91,68	10.672.300,00
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	452.928.000,00	389.878.400,00	86,08	63.049.600,00



Tabel 2.11
Diagram Realilasi Anggaran
Per 31 Desember 2024



2.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

2.3.1. Hambatan dan Kendala Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

Hambatan dan Kendala Per 31 Desember 2024 (BLPU) yang dibawah 80% terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.12
Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		KENDALA/HAMBATAN
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	25.130.000,00	50,26	Kegiatan menyesuaikan kunjungan tamu
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	10.295.393,00	51,48	Kegiatan tersebut sudah disediakan oleh dinas terkait (Diskominfostandi)
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000,00	170.093.013,00	65,42	Untuk Belanja suku cadang alat angkutan dan Belanja pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan sudah sesuai dengan kebutuhannya



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		KENDALA/HAMBATAN
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000,00	170.093.013,00	65,42	Untuk Belanja suku cadang alat angkutan dan Belanja pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan sudah sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan jumlah tagihan pajaknya
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000,00	209.871.900,00	77,73	Untuk Belanja suku cadang alat angkutan dan Belanja pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan sudah sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan jumlah tagihan pajaknya

Sumber Data : Para PPTK masing-masing bidang di Bappelitbangda Kota Bekasi

2.3.2. Hambatan dan Kendala Belanja Langsung Urusan (BLU)

Hambatan dan Kendala 31 Desember 2024 (BLU) yang dibawah 80% terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		KENDALA/HAMBATAN
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	330.000.000,00	235.203.200,00	71,27	Sehubungan dengan materi Forum Satu Data membahas kebutuhan data prioritas daerah lingkup internal Kota Bekasi, sehingga narasumber dari pusat atau provinsi tidak diundang dan tenaga ahli ASN tidak dilibatkan dalam Forum Satu Data mengingat tidak ada penyusunan laporan sehingga tidak ada pendampingan dari Tenaga Ahli ASN.
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PID	59.665.500,00	16.695.609,00	27,98	Dengan tidak mengundang narasumber dari pusat atau provinsi maka anggaran untuk narasumber tidak digunakan



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU TAHUN ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024		KENDALA/HAMBATAN
			Rp.	% TERHADAP PAGU	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.400.000.000,00	754.393.480,00	53,89	karena adanya rekomendasi dari Inspektorat Kota Bekasi terkait dengan rencana pengalokasian dan realisasi anggaran yang disesuaikan dengan Kepwal Nomor 913/Kep.141.BANG/III/2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024. mengingat waktu yang terbatas dengan adanya rekomendasi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan sehingga menyebabkan tidak terealisasinya anggaran honorarium sesuai perencanaan yang sudah ditentukan
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.530.000,00	67.213.600,00	74,24	sppd ke bandung tidak dilaksanakan krn tidak bisa menentukan waktu yang tepat untuk berkonsultasi dikarenakan jadwal bidang PMM provinsi sangat padat dan untuk makan minum rapat kontrak di buat setahun, saat akan dikurangi pada ABT kurang waktu untuk perubahan, dilaksanakan adendum kontrak sehingga tidak mengurangi pagu makan dan minum rapat
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	75.604.000,00	58.084.550,00	76,83	Perjalan dinas tidak banyak dilakukan dikarenakan sebagian dilakukan melalui zoom meeting dan kegiatan dilakukan di dinas terkait

Sumber Data : Para PPTK masing-masing bidang di Bappelitbangda Kota Bekasi

Hambatan/Kendala tidak tercapainya Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dibawah 80% secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja makanan dan minuman sesuai hasil negosiasi;
2. Anggaran belanja perjalanan dinas tidak semuanya digunakan disebabkan karena kegiatan rapat koordinasi dilakukan melalui zoom meeting;



3. Anggaran honorarium narasumber tidak digunakan karena materi pelaksanaan Forum Satu Data hanya membahas kebutuhan data prioritas daerah lingkup internal Kota Bekasi sehingga tidak mengundang narasumber dari pusat atau provinsi dan tenaga ahli ASN tidak diikuti sertakan karena tidak adanya pendampingan dalam penyusunan laporan kegiatan;
4. Anggaran belanja alat kantor lainnya berupa penggandaan tidak seluruhnya digunakan karena data yang digunakan dibuat dalam bentuk soft copy.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Bappelitbangda Kota Bekasi.

SAI terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD (SIMDARA). SIMDA Keuangan dirancang untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca, SIMDA BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya serta SIMDARA adalah sistem yang menghasilkan informasi persediaan untuk penyusunan Laporan Operasional (LO).

3.1 Basis Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yaitu basis akrual untuk penyusunan dan penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, *tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan*. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi

dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Unsur Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA diakui pada saat;
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- h. Surplus/Defisit-LRA;
Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- i. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi –realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan. Selisih lebih/kurang antar arealisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pemerintah Kota Bekasi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Akun pada Neraca terdiri dari:

2.1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sifatnya likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.2. Piutang (JIKA SKPD MEMILIKI PIUTANG)

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagaiberikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar ;
- c. Kualitas Piutang Diragukan ;
- d. Kualitas Piutang Macet .

Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).

2.2.1 PenyisihanPiutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Tata cara penyisihan piutang :

a. Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :

- 1) Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti :piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
- 2) Piutang dari Perikatan antara lain Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 3) Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerntah lainnya dan piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

b. Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- 1) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a) Jatuh tempo piutang dan/atau
 - b) Upaya penagihan.
- 2) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a) Kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan; dan
 - d) Kualitas macet.

c. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :

1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:



(a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- e. Wajib pajak likuid; dan/atau
- f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau



- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau



- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- (c) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau



- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara
- (d) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - (1) Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara

Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif

No.	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
3.	Diatas 2 s/d 5 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif
4.	Diatas 5 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- Beban penyisihan piutang;
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

2.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.

Pengakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan diakui pada saat :
 - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
- Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname :
 - Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban Persediaan kadaluarsa/Rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan

kadaluarsa/rusak.

- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan.

2.4 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan oleh tim penilai.

Internal/tim verifikasi atau untuk tanah dapat menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah setempat. Jika aset tetap selain tanah nilai perolehannya tidak didapat maka dapat menggunakan nilai sesuai SP2D sejenis pada tahun perolehannya.

1. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Harga Wajar bisa didapat dengan mencari nilai per satuan barang sejenis yang dibeli pada tahun perolehan tersebut.

2.5 Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
3. Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) semester (6 bulan) atau 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya;

2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:



1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

1. Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian Aset Lainnya, yaitu :

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umumdaerah;
4. Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
5. Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

6. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagaiberikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun
9. Lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulanperolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
11. Tata car apenghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan Kepala Daerah tersendiri;
12. Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
13. Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan

dikapitalisasi keaset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;

14. Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
15. Perbaikan tersebut meliputi :
 - a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 - b. Perbaikan *software/aplikasi* yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

2.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena Pemerintah Daerah telah menerima manfaat barang/jasa sesuai kontrak pengadaan barang /jasa atau terbit surat penagihan (*invoice*) dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



Utang Beban terdiri atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang dan jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-lain

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.
- b. Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada:
- a. Saat timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset
Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - d. Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/ atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).
- Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban

dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar.
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga

diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/deposit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

- d) Ekuitas akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1A Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya Tahun 2024. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan dan Belanja.

4.1A.1 Belanja-LRA

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp29.784.439.496,00

Rp30.169.405.250,00

Realisasi Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.784.439.496,00 dari total anggaran sebesar Rp32.475.464.220,00. Terdapat pos-pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp2.691.024.724,00,00 atau dari keseluruhan anggaran terealisasi 91,71%. Pagu Anggaran Murni Tahun 2024 sebesar Rp33.605.152.520,00 bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terdapat penambahan pagu anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.000.000.000,00. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja-LRA
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5	BELANJA DAERAH	32.475.464.220,00	29.784.439.496,00	91,71	30.169.405.250,00
5.1	BELANJA OPERASI	31.987.924.220,00	29.302.966.246,00	91,61	29.662.370.250,00
5.1.1	Belanja Pegawai	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	18.466.420.178,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.640.389.220,00	9.989.972.638,00	85,82	11.195.950.072,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.2	BELANJA MODAL	487.540.000,00	481.473.250,00	98,76	507.035.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	487.540.000,00	481.473.250,00	98,76	507.035.000,00

Tabel 4.2
Diagram Belanja-LRA
Per 31 Desember 2024



4.1A.1.1 Belanja Operasi-LRA **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp29.302.966.246,00 **Rp29.662.370.250,00**

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp31.987.924.220,00 dengan realisasi sebesar Rp29.302.966.246,00 atau 91,61% yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp19.312.993.608,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.989.972.638,00.

Tabel 4.3
Belanja Operasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1	BELANJA OPERASI	31.987.924.220,00	29.302.966.246,00	91,61	29.662.370.250,00
5.1.1	Belanja Pegawai	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	18.466.420.178,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.640.389.220,00	9.989.972.638,00	85,82	11.195.950.072,00

4.1A.1.1.1 Belanja Pegawai **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp19.312.993.608,00 **Rp18.466.420.178,00**

Belanja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.347.535.000,00. dengan realisasi sebesar Rp19.312.993.608,00 atau sebesar 94,92%. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.1	Belanja Pegawai	20.347.535.000,00	19.312.993.608,00	94,92	18.466.420.178,00
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	4.245.893.000,00	4.029.196.404,00	94,90	3.754.594.200,00
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	386.913.000,00	354.514.564,00	91,63	337.856.692,00
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	340.911.000,00	220.810.000,00	64,77	229.450.000,00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	605.155.000,00	296.420.000,00	48,98	273.140.000,00
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.051.000,00	72.485.000,00	80,49	78.380.000,00
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	246.555.000,00	192.202.680,00	77,96	199.734.360,00
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.128.000,00	26.851.194.000,00	76,44	6.629.162,00
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.000,00	55.752,00	88,50	46.673,00
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.901.823.000,00	10.686.060.645,00	98,02	5.792.090.271,00
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0	4.531.779.261,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.426.943.000,00	3.369.228.044,00	98,32	3.203.678.434,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.700.000,00	40.396.975,00	94,61	35.947.175,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.400.000,00	24.772.350,00	97,53	23.093.950,00

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi terdapat pengembalian belanja/contra post pada Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.5
Rekapitulasi Pengembalian Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	JENIS SPM	URAIAN	NILAI
1	09 Juli 2024	001/Bappelitbangda/VII/2024	Langsung (LS)	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS (Eks. Suami) bulan Januari dan Februari 2024 an. Dara Pradita, A.Md.	772.720,00

4.1A.1.1.2 Belanja	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Barang	Rp9.989.972.638,00	Rp11.195.950.072,00
dan Jasa		

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang Habis Pakai, Belanja, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri,



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Di Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp11.640.389.220,00 dengan realisasi sebesar Rp9.989.972.638,00,00 atau 85,82% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Operasi-Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 4.6
Belanja Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.640.389.220,00	9.989.972.638,00	85,82	11.195.950.072,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	398.120.000,00	232.612.453,00	58,43	172.279.381,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	240.000.000,00	157.937.000,00	65,81	167.985.250,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.697.400,00	126.218.750,00	95,12	69.236.600,00
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	62.033.000,00	61.460.050,00	99,08	33.087.500,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.816.000,00	3.752.400,00	98,33	6.600.000,00
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.050.000,00	672.500,00	64,05	1.754.800,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	240.038.000,00	169.715.000,00	70,70	321.624.000,00
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.968.000,00	1.896.000,00	96,34	4.357.000,00
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.753.600,00	1.586.300,00	90,46	1.018.000,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0	27.048.000,00
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	196.860.000,00	181.048.000,00	91,97	72.183.500,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	620.528.500,00	488.254.272,00	78,68	677.404.213,00
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0	31.296.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	56.674.000,00	56.274.600,00	99,30	49.510.500,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	702.443.000,00	561.051.700,00	79,87	543.693.500,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.990.000,00	27.113.500,00	52,15	83.180.000,00
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0	150.155.000,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.385.000,00	20.250.000,00	86,59	23.265.000,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0	108.455.000,00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0	151.510.000,00
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	201.800.000,00	133.100.000,00	65,96	138.200.000,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	637.000.000,00	135.250.000,00	21,23	538.750.000,00
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	14.000.000,00	14.000.000,00	100	0,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.811.875.000,00	1.792.433.125,00	98,93	2.596.110.190,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0	160.862.813,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.460.700.000,00	1.434.225.000,00	98,19	1.478.073.000,00
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	75.000.000,00	75.000.000,00	100	60.000.000,00
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	709.020.000,00	698.322.230,00	98,49	509.400.000,00
5.1.2.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	66.690.000,00	27.279.319,00	40,90	14.763.150,00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.000.000,00	1.218.593,00	60,93	4.952.617,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	56.000.000,00	56.000.000,00	100	30.000.000,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	18.000.000,00	9.076.800,00	50,43	36.307.200,00
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.000.000,00	26.329.700,00	75,43	24.120.100,00
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	95.740.000,00	94.899.312,00	99,12	113.399.097,00
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.180.320,00	4.174.560,00	99,86	6.671.340,00
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.225.400,00	5.218.200,00	99,86	8.339.175,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	21.000.000,00	100	9.500.000,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	5.995.000,00	99,92	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.1.2.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0	355.416.000,00
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang- Telematika	151.750.000,00	150.550.000,00	99,21	156.156.000,00
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	681.120.000,00	681.120.000,00	100	500.000.000,00
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	280.000.000,00	280.000.000,00	100	26.500.000,00
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0	72.000.000,00
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000,00	52.595.000,00	70,13	58.812.500,00
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	1.180.000,00	11,80	0,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	73.000.000,00	69.500.000,00	95,21	17.500.000,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.000.000,00	44.850.000,00	95,43	7.500.000,00
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	974.510.000,00	779.583.274,00	80,00	623.102.646,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.650.000,00	213.090.000,00	81,75	214.650.000,00
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	539.328.000,00	524.870.000,00	97,32	283.975.000,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	425.900.000,00	403.440.000,00	94,73	377.246.000,00
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	169.544.000,00	165.830.000,00	97,81	78.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.1A.1.2	Belanja	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Modal-LRA	Rp481.473.250,00	Rp507.035.000,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari Belanja Modal-Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp487.540.000,00. dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp481.473.250,00 atau 98,76%.

4.1A.1.2.1	Belanja Modal	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Peralatan dan	Rp481.473.250,00	Rp507.035.000,00
	Mesin		

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Terdiri dari, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan Belanja Modal Personal Computer.

Pada Tahun 2024 ini dianggarkan sebesar Rp487.540.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp481.473.250,00 atau 98,76%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 4.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN TA. 2024	REALISASI TA. 2024	%	AUDITED TA. 2023
5.2	Belanja Modal	487.540.000,00	481.473.250,00	98,76	507.035.000,00
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0	99.410.000,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	100.000.000,00	99.920.000,00	99,92	33.695.000,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.660.000,00	23.400.000,00	98,90	147.930.000,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	23.476.500,00	93,91	0,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	338.880.000,00	334.676.750,00	98,76	0,00
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0	226.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.1A.2 Surplus (Defisit)	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
LRA	Rp(29.784.439.496,00)	Rp(30.169.405.250,00)

Surplus (Defisit) Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp(29.784.439.496,00).

4.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;

4.2.1 Aset	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp4.884.933.315,22	Rp5.519.500.219,68

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 memiliki aset sebesar Rp4.884.933.315,22 dan Rp5.519.500.219,68, dengan rincian sebagai berikut :



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.8
Rekapitulasi Aset
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	274.008.690,00	149.181.070,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap	4.522.084.626,97	5.232.779.153,18
Aset Lainnya	88.839.998,25	137.539.996,50
Jumlah	4.884.933.315,22	5.519.500.219,68

4.2.1.1	Aset Lancar	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp274.008.690,00	Rp149.181.070,00

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset lancar yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi hingga tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

4.2.1.1.1	Kas di	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Bendahara	Rp0,00	Rp0,00
	Pengeluaran		

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 900/Kep.65-BPKAD/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 tentang Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi besaran Uang Persediaan (UP) sebesar Rp53.400.000,00 dan Kartu Kredit Perangkat Daerah (KKPD) sebesar Rp35.600.000,00. Per 31 Desember 2024 Kas di bendahara pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi pada Rekening Koran sebesar Rp0,00 dan pada Kartu Kredit Perangkat Daerah (KKPD) sebesar Rp35.600.000,00 dengan sisa uang persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.671.637,00 telah disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp1.671.637,00 pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Surat Tanda Setor (STS) nomor : 001/045/S.UP/BAPPELITBANGDA/XII/2024.

4.2.1.1.2	Persediaan	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp274.008.690,00	Rp149.181.070,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 6 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Perangkat Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Penghitungan nilai persediaan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out). Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah memiliki Saldo Awal Persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp149.181.070,00 yang merupakan Saldo Akhir Persediaan Tahun Anggaran 2023 dan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp274.008.690,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1.1.12.1.3.1	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.960.600,00	34.583.750,00
1.1.12.1.3.2	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24.343.840,00	9.176.120,00
1.1.12.1.3.6	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	211.970.650,00	105.421.200,00
1.1.12.1.3.13	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik	733.600,00	0,00
TOTAL		274.008.690,00	149.181.070,00

Tabel 4.10
Kondisi Barang Per Jenis Rekening Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Nama Barang	Saldo Per 31 Desember 2024		Kondisi Barang		
		Jumlah	Rp.	Baik	Rusak Berat	Usang
1.1.12.1.3.1	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					
	1. Cetak Plakat	66	19.800.000,00	√		
	2. Kalkulator	2	298.000,00	√		
	3. Map Batik Kain	3	90.000,00	√		
	4. Map Dinas	1.170	11.641.500,00	√		
	5. Pen Balliner	96	1.708.800,00	√		
	6. Pita Correction Mesin Tik Elektrik	6	354.000,00	√		



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Nama Barang	Saldo Per 31 Desember 2024		Kondisi Barang		
		Jumlah	Rp.	Baik	Rusak Berat	Jumlah
	7. Pita Mesin Tik Elektrik	13	1.225.900,00	√		
	8. Pulpen Ball Liner	36	630.000,00	√		
	9. Rautan Pensil Meja	3	378.000,00	√		
	10. Stabillo	7	95.900,00	√		
	11. Stapler Besar	2	60.000,00	√		
	12. Stapler Gun	10	678.500,00	√		
1.1.12.1.3.2	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					
	1. Cetak Amplop Besar	39	2.847.000,00	√		
	2. Kertas A3 80 Gram	5	420.000,00	√		
	3. Kertas A3 80 Gram	15	1.867.500,00	√		
	4. Kertas Fax	20	560.000,00	√		
	5. Kertas HVS A3 80 gr	6	749.340,00	√		
	6. Kertas HVS A4 70 gr	280	16.100.000,00	√		
	7. Kertas HVS F4 70 gr	30	1.800.000,00	√		
1.1.12.1.3.6	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	1. Catridge Fuji Xerox DocuPrint P255DW	2	1.300.000,00	√		
	2. Catridge T188	25	9.250.000,00	√		
	3. Catridge T188	4	1.600.000,00	√		
	4. Epson Ink Catridge-Light Cyan	11	825.000,00	√		
	5. Epson Ink Catridge-Light Magenta (C13T673699)	11	825.000,00	√		
	6. Epson T664 Ink BK	47	3.525.000,00	√		
	7. Epson T664 Ink BK	81	7.533.000,00	√		
	8. Epson T664 Ink C	25	1.875.000,00	√		
	9. Epson T664 Ink M	24	1.800.000,00	√		
	10. Epson T664 Ink Y	25	1.875.000,00	√		
	11. HP 955XL Black Original Ink Catridge (LOS72AA)	8	3.600.000,00	√		
	12. HP 955XL Black Original Ink Catridge (LOS72AA)	2	1.046.000,00	√		
	13. HP 955XL Black Original Ink Catridge (LOS63AA)	7	2.660.000,00	√		
	14. HP 955XL Black Original Ink Catridge (LOS63AA)	2	846.000,00	√		
	15. HP 955XL Magenta Original Ink Catridge (LOS66AA)	7	2.660.000,00	√		
	16. HP 955XL Magenta Original Ink Catridge (LOS66AA)	1	423.000,00	√		
	17. HP 955XL Yellow Original Ink Catridge (LOS569AA)	7	2.660.000,00	√		
	18. HP 955XL Yellow Original Ink Catridge (LOS569AA)	2	846.000,00	√		
	19. HP Toner Cartridge 93A Black (CZ192A)	2	4.500.000,00	√		
	20. HP Toner Cartridge 93A Black (CZ192A)	3	6.885.000,00	√		
	21. Ink Bottle Epson 003 Black	4	300.000,00	√		
	22. Ink Bottle Epson 664 Black	18	2.070.000,00	√		
	23. Ink Bottle Epson 664 Cyan	8	920.000,00	√		
	24. Ink Bottle GI-71 Black	8	480.000,00	√		
	25. Ink Bottle GI-71 Cyan	4	240.000,00	√		
	26. Ink Bottle GI-71 Magenta	4	240.000,00	√		



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Nama Barang	Saldo Per 31 Desember 2024		Kondisi Barang		
		Jumlah	Rp.	Baik	Rusak Berat	Jumlah
	27. Ink Bottle GI-71 Yellow	4	240.000,00	√		
	28. Ink Bottle T49K Colour	3	1.020.000,00	√		
	29. Keyboard USB	1	200.000,00	√		
	30. T49K Ink Bottle Black (140 ml)	8	4.240.000,00	√		
	31. T49K Ink Bottle Black (140 ml)	2	1.191.000,00	√		
	32. Tinta 001 Hitam Compatible	10	1.100.000,00	√		
	33. Tinta 001 Warna Compatible	18	1.350.000,00	√		
	34. Tinta Epson T 673 Black	6	1.008.000,00	√		
	35. Tinta Epson T 673 Light Cyan	3	550.500,00	√		
	36. Tinta Epson T 673 Light Magenta	1	150.000,00	√		
	37. Tinta Epson T 673 Light Magenta	3	550.500,00	√		
	38. Tinta Printer T673 (Black)	5	1.200.000,00	√		
	39. Tinta Printer T673 (Warna)	15	3.600.000,00	√		
	40. Tinta Toner Laser Jet 12A	6	5.520.000,00	√		
	41. Toner 054 Black	2	1.840.000,00	√		
	42. Toner 054 Colour	2	1.840.000,00	√		
	43. Toner 263 CL	2	3.800.000,00	√		
	44. Toner 307A Black	6	9.900.000,00	√		
	45. Toner 307A Black	3	5.235.000,00	√		
	46. Toner 307A Colour	6	18.000.000,00	√		
	47. Toner 508 Colour	2	4.990.000,00	√		
	48. Toner DR 263 CL Black	5	9.000.000,00	√		
	49. Toner DR 263 CL Black	2	3.980.000,00	√		
	50. Toner DR 263 CL Cyan	5	9.000.000,00	√		
	51. Toner DR 263 CL Magenta	5	9.000.000,00	√		
	52. Toner DR 263 CL Yellow	5	9.000.000,00	√		
	53. Toner HP 79A	5	5.495.000,00	√		
	54. Toner HP 85A	2	1.300.000,00	√		
	55. Toner HP Laserjet 508A Hitam	2	3.490.000,00	√		
	56. Toner Laserjet No 79A	6	3.900.000,00	√		
	57. Toner Laserjet No 79A	3	2.911.650,00	√		
	58. Toner TN 263 Black	3	2.235.000,00	√		
	59. Toner TN 263 Black	2	3.600.000,00	√		
	60. Toner TN 263 Colour	9	16.200.000,00	√		
	61. Toner TN 3448	2	2.800.000,00	√		
	62. Toner TN 3448	1	1.750.000,00	√		
1.1.12.1.3.8	Persediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik					
	1. Baterai AA	284	710.000,00	√		
	2. Baterai AAA	8	23.600,00	√		
	JUMLAH	2.608	274.008.690,00			

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi memiliki nilai barang yang tidak menjadi persediaan sebesar Rp999.637.153,00, Reklasifikasi Barang Persediaan ke Non Persediaan sebesar Rp453.004.272,00 dan Reklasifikasi Antar Persediaan sebesar Rp35.115.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.11
Belanja Barang Yang Tidak Menjadi Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	Rp
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	232.612.453,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	157.937.000,00
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	672.500,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.250.000,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	561.051.700,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.113.500,00
JUMLAH		999.637.153,00

Tabel 4.12
Reklasifikasi Barang Persediaan Ke Non Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO. SPM	DARI	KE	Rp
00213/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	1.347.000,00
00220/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	11.974.750,00
00224/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	1.679.000,00
00234/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	4.307.000,00
00238/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	2.175.000,00
00242/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	10.270.150,00
00244/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	1.708.100,00
00258/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	5.482.700,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO. SPM	DARI	KE	Rp
00263/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	1.528.500,00
00265/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	2.421.400,00
00299/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	392.000,00
00300/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	4.426.050,00
00302/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.057.715,00
00303/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.057.715,00
00306/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	2.905.570,00
00310/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	35.349.850,00
00323/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.886.400,00
00326/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	1.207.800,00
00337/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	19.047.500,00
00338/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	10.474.500,00
00347/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	11.357.500,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO. SPM	DARI	KE	Rp
00349/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.356.700,00
00351/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	747.000,00
00356/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	4.728.400,00
00363/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	4.160.000,00
00364/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	9.469.950,00
00365/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	8.779.050,00
00366/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	16.751.500,00
00368/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	96.015.000,00
00369/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.665.500,00
00388/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	4.791.600,00
00395/SPM-GUN/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	1.447.900,00
00399/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.997.250,00
00199/SPM-GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Cetak Dokumen)	Beban Non Persediaan	26.621.000,00
00198/SPM-GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	9.727.700,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO. SPM	DARI	KE	Rp
00187/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Spanduk)	Beban Non Persediaan	1.977.800,00
00181/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	3.929.662,00
00179/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	8.720.200,00
00132/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	7.094.750,00
00129/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	22.230.050,00
00128/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Cetak Dokumen)	Beban Non Persediaan	26.993.100,00
00105/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	870.000,00
00100/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	1.015.000,00
00099/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan dan Penjilidan)	Beban Non Persediaan	4.357.610,00
00092/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	7.101.900,00
00091/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	7.101.900,00
00068/SPM- LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan dan Penjilidan)	Beban Non Persediaan	3.484.510,00
00062/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan)	Beban Non Persediaan	9.999.780,00
00060/SPM- GUP/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan dan Penjilidan)	Beban Non Persediaan	1.946.760,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

NO. SPM	DARI	KE	Rp
00044/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan dan Penjilidan)	Beban Non Persediaan	5.802.100,00
00041/SPM-LS/BAPPELITBANGDA/2024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Penggandaan dan Penjilidan)	Beban Non Persediaan	8.064.400,00
JUMLAH			453.004.272,00

Tabel 4.13
Reklasifikasi Antar Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

DARI	KE	Rp
8.1.2.1.1.24 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (flashdisk)	8.1.2.1.1.29 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.265.000,00
8.1.2.1.1.36 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Cetak Map Dinas)	8.1.2.1.1.24 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.850.000,00
JUMLAH		35.115.000,00

4.2.1.2 Aset Tetap

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Rp4.522.084.626,97

Rp5.232.779.153,18

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.522.084.626,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.14
Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Jenis Aset tetap	Per 31 Desember 2024	Awal Tahun 2024	Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	15.393.027.838,14	15.048.080.497,14	15.048.080.497,14
1.3.3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	396.902.147,18	396.902.147,18	396.902.147,18



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Jenis Aset tetap	Per 31 Desember 2024	Awal Tahun 2024	Per 31 Desember 2023
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(11.288.695.358,35)	(10.233.053.491,14)	(10.233.053.491,14)
JUMLAH		4.522.084.626,97	5.232.779.153,18	5.232.779.153,18

4.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp15.393.027.834,14 Rp15.048.080.497,14

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
REKAPITULASI ASET TETAP
PERALATAN DAN MESIN
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	URAIAN		JUMLAH
1	SALDO AWAL 1 Januari 2024		15.048.080.497,14
	MUTASI TAMBAH	BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2024	481.473.250,00
		MUTASI ANTAR SKPD	0,00
		HIBAH MASUK	0,00
		UTANG PENGADAAN ASET	0,00
2	JUMLAH MUTASI TAMBAH		0,00
3	REKLAS KE ASET TETAP		0,00
4	JUMLAH MUTASI KURANG		136.525.909,00
5	REKLAS KE EKSTRAKOMPATIBEL		0,00
6	REKLAS KE ASET LAINNYA		0,00
7	SALDO AKHIR Per 31 Desember 2024 (1+2-3)		15.393.027.838,14

Sumber Data : Pemutakhiran Data Atas Posisi Aset Tetap

Dengan rincian Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

Tabel 4.16
PERALATAN DAN MESIN
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.3.2.01.03	Alat Bantu	0,00	7.019.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.414.050.800,00	5.601.355.700,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	13.265.000,00	3.465.000,00
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	5.000.000,00	8.100.000,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	1.067.528.031,15	580.308.489,15
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	1.976.270.211,00	1.943.658.314,00
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	838.030.621,00	473.311.179,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	295.395.500,00	1.237.439.200,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	22.683.800,00	23.283.800,00
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	17.388.960,00	0,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	3.855.438.420,99	3.733.828.470,99
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	1.886.076.494,00	1.423.554.344,00
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	2.467.000,00
1.3.2.15.03	Alat SAR	0,00	8.390.000,00
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL		15.393.027.838,14	15.048.080.497,14

Rincian Aset Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Penambahan:

1. Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp481.473.250,00,
2. Mutasi Masuk per 31 Desember 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi tidak mendapatkan mutasi masuk.

Pengurangan:

1. Mutasi Keluar per 31 Desember 2024 sebesar Rp136.525.909,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Nomor : 028/930-BA.STBI/Bappelitbangda.Set sebesar Rp35.575.909,00;
 - 1.2. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Kecamatan Medan Satria, Nomor: 000.3.2/4882-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp12.400.000,00;
 - 1.3. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke UPTD Puskesmas Karang Kitri, Nomor : 000.3.2/4883-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp5.850.000,00;
 - 1.4. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Kecamatan Pondok Gede , Nomor : 000.3.2/4884-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp5.850.000,00;
 - 1.5. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Kecamatan Bekasi Timur, Nomor : 000.3.2/4885-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp15.400.000,00;



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

- 1.6. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke RSUD Type D Jatisampurna, Nomor: 000.3.2/4886-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp15.400.000,00;
- 1.7. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Nomor : 000.3.2/4887-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp5.850.000,00;
- 1.8. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Nomor : 000.3.2/4888-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp15.400.000,00;
- 1.9. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Nomor : 000.3.2/4891-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp12.400.000,00;
- 1.10. Transfer Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Nomor : 000.3.2/4891-BASTB/Bappelitbangda.Litbang sebesar Rp12.400.000,00.

4.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2024</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp0,00
--------------------------------------	---	---

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Tidak ada Mutasi tambah dan Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Aset Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Unit	Nilai	Keterangan
1	Bangunan gedung kantor	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1 unit	0,00	Gedung Bappelitbangda Dicatat sebagai aset Setda
	Jumlah		0,00	

4.2.1.2.3 Jalan, Jaringan dan Instalasi	<u>31 Desember 2024</u> Rp20.850.000,00	<u>31 Desember 2023</u> Rp20.850.000,00
--	--	--

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



(dalam rupiah)

4.2.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp396.902.147,18	Rp396.902.147,18

Tabel 4.19
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

4.2.1.2.5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	<u>31 Desember 2024</u> Rp(11.288.695.358,35)	<u>31 Desember 2023</u> Rp(10.233.053.491,14)
-----------	---------------------------------------	--	--

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Bekasi dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp(11.288.695.358,35) merupakan saldo akhir penyusutan 31 Desember 2024.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	0,00	1.836.000,00
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	2.755.315.663,34	2.276.096.410,00
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.265.000,00	13.265.000,00
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	5.000.000,00	3.958.333,00
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.190.902.341,33	2.994.764.240,15
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	290.407.533,34	278.425.077,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	17.388.960,00	17.388.960,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	5.006.088.985,34	4.638.035.095,99
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	1.900.000,00	1.900.000,00
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	8.426.875,00	7.384.375,00
TOTAL		11.288.695.358,35	10.233.053.491,14

4.2.1.3 Aset Lainnya **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp88.839.998,25 **Rp137.539.996,50**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada periode 31 Desember 2024 aset lainnya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp88.839.998,25 yang terdiri dari aset tidak berwujud, aset lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.21
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud	3.115.655.943,00	3.115.655.943,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	588.264.168,00	600.996.168,00
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.066.955.944,75)	(3.018.255.946,50)



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(548.124.168,00)	(560.856.168,00)
TOTAL		88.839.998,25	137.539.996,50

4.2.1.3.1	Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp3.115.655.943,00	Rp3.115.655.943,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.115.655.943,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.22
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.3.05.01	Software	2.990.805.943,00	2.990.805.943,00
1.5.3.05.02	Kajian	124.850.000,00	124.850.000,00
TOTAL		3.115.655.943,00	3.115.655.943,00

4.2.1.3.2	Aset Lain-lain..	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp588.264.168,00	Rp588.264.168,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp588.264.168,00 dan Rp588.264.168,00. Aset tak berwujud selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
Rincian Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.4.01.01	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	168.221.826,00	168.221.826,00
1.5.4.03.01	Aset Kondisi Rusak Berat	420.042.342,00	420.042.342,00
TOTAL		588.264.168,00	588.264.168,00

4.2.1.3.3	Akumulasi	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Amortisasi Aset	Rp(3.066.955.944,75)	Rp(3.018.255.946,50)
	Tidak Berwujud		

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp(3.066.955.944,75). Untuk nilai buku Aset Tidak Berwujud yang sudah tidak bernilai namun masih dipergunakan diberi nilai Rp1,00.



Tabel 4.24
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(2.085.502.200,00)	(2.085.502.200,00)
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(932.753.745,50)	(932.753.745,50)
TOTAL		(3.066.955.944,75)	(3.018.255.946,50)

4.2.1.3.4 Akumulasi **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Penyusutan Aset **Rp(548.124.168,00)** **Rp(548.124.168,00)**
Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke Aset Lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp(548.124.168,00).

Tabel 4.25
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1.5.6.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(392.634.342,00)	(392.634.342,00)
1.5.6.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat)	(155.489.826,00)	(155.489.826,00)
TOTAL		(548.124.168,00)	(548.124.168,00)

4.2.2 Kewajiban **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
 Rp0,00 **Rp3.431.600,00**

Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi Nilai kewajiban Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dikarenakan internet berfokus pada Dinas Kominfostandi Kota Bekasi. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pada Per 31 Desember 2024 nilai masing-masing kewajiban adalah sebagai berikut:

- Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00,
- Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.2.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp00,00	Rp3.431.600,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, nilai total pada per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

4.2.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban jangka panjang pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Kewajiban Jangka Panjang hanya bersumber dari Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi tidak memiliki Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang.

4.2.3	Ekuitas	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp4.884.933.315,22	Rp5.516.068.619,68

Nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.884.933.315,22 yang merupakan nilai dari Aset Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

4.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.3.1. Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bukan merupakan entitas dinas penghasil dan tidak ada hibah masuk. Pendapatan-LO Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebesar Rp0,00.

4.3.2. Beban-LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp30.314.624.785,46	Rp30.570.169.558,25

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penerusan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pada per 31 Desember 2024, Beban-LO Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp30.314.624.785,46 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp30.314.624.785,46.

4.3.2.1 Beban Operasi-LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp30.314.624.785,46	Rp30.570.169.558,25

Beban Operasi merupakan beban atau pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi ini meliputi Beban Pegawai sebesar Rp19.312.993.608,00, Beban Persediaan sebesar Rp512.373.480,00 Beban Jasa sebesar Rp5.807.590.239,00, Beban Barang sebesar Rp1.452.641.425,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp168.125.000,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp1.920.983.274,00, Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.091.217.761,21 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp48.699.998,25.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.3.2.1.1	Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Pegawai-LO	Rp19.312.993.608,00	Rp18.466.420.187,00

Beban Pegawai-LO merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai-LO ini berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi.

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual dan Pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban per 31 Desember 2024.. Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.312.993.608,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.26
Beban Pegawai – LO
Per 31 Desember2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.1.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.029.196.404,00	3.754.594.200,00
8.1.1.01.01.0002	Beban Tunjangan Keluarga – LO	354.514.564,00	337.856.692,00
8.1.1.01.01.0003	Beban Tunjangan Jabatan – LO	220.810.000,00	229.450.000,00
8.1.1.01.01.0004	Beban Tunjangan Fungsional – LO	296.420.000,00	273.140.000,00
8.1.1.01.01.0005	Beban Tunjangan Fungsional Umum – LO	72.485.000,00	78.380.000,00
8.1.1.01.01.0006	Beban Tunjangan Beras – LO	192.202.680,00	199.734.360,00
8.1.1.01.01.0007	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	26.851.194,00	6.629.162,00
8.1.1.01.01.0008	Beban Pembulatan Gaji – LO	55.752,00	46.673,00
8.1.1.01.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	10.686.060.645,00	5.792.090.271,00
8.1.1.01.02.0003	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	0,00	4.531.779.261,00
8.1.1.01.02.0005	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	3.369.228.044,00	3.203.678.434,00
8.1.1.01.03.0007	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.396.975,00	35.947.175,00
8.1.1.01.03.0008	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	24.772.350,00	23.093.950,00
JUMLAH		19.312.993.608,00	18.466.420.178,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.3.2.1.2 Beban Persediaan-LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp512.373.480,00 Rp576.906.814,00

Beban Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai. Beban persediaan merupakan beban yang mencatat pemakaian atas persediaan dan diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp512.373.480,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.27
Beban Persediaan-LO
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.1.1.24	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	148.426.900,00	93.069.020,00
8.1.2.1.1.25	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	46.292.330,00	53.120.050,00
8.1.2.1.1.27	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.752.400,00	6.600.000,00
8.1.2.1.1.29	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	68.430.550,00	273.814.244,00
8.1.2.1.1.30	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.896.000,00	3.922.000,00
8.1.2.1.1.31	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	852.700,00	1.018.000,00
8.1.2.1.1.35	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	181.048.000,00	83.083.500,00
8.1.2.1.1.36	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.400.000,00	12.769.500,00
8.1.2.1.1.43	Beban Natura dan Pakan-Natura	56.274.600,00	49.510.500,00
JUMLAH		Rp512.373.480,00	Rp576.906.814,00

Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri dari 9 (sembilan) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut ada yang sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran, ada pula yang berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan beban terjadi saat transaksi/ kejadian, bukan saat kas diterima, sehingga apabila instansi sudah menerima bukti transaksi berupa Berita Acara Serah Terima atau yang dipersamakan, maka sudah dapat diakui sebagai beban.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.28
Rincian Perhitungan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Beban Alat Tulis Kantor, dengan rincian sebagai berikut:	148.426.900,00	
	Persediaan Awal	34.583.750,00	
	Pembelian	150.803.750,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	185.387.500,00	
	Persediaan yang digunakan	148.426.900,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	36.960.600,00	
2	Beban Kertas dan Cover, dengan rincian sebagai berikut:	46.292.330,00	
	Persediaan Awal	9.176.120,00	
	Pembelian	61.460.050,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	70.636.170,00	
	Persediaan yang digunakan	46.292.330,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	24.343.843,00	
3	Benda Pos, dengan rincian sebagai berikut:	3.752.400,00	
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	3.752.400,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	3.752.400,00	
	Persediaan yang digunakan	3.752.400,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	0,00	
4	Bahan Komputer, dengan rincian sebagai berikut:	68.430.550,00	
	Persediaan Awal	105.421.200,00	
	Pembelian	174.980.000,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	280.401.200,00	
	Persediaan yang digunakan	68.430.550,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	211.970.650,00	
5	Beban Perabot Kantor, dengan rincian sebagai berikut:	1.896.000,00	
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	1.896.000,00	



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

6	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	1.896.000,00	
	Persediaan yang digunakan	1.896.000,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	0,00	
	Beban Alat Listrik, dengan rincian sebagai berikut:		852.700,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	1.586.300,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	1.586.300,00	
	Persediaan yang digunakan	852.700,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	733.600,00	
7	Beban Souvenir/Cendera Mata, dengan rincian sebagai berikut:		181.048.000,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	181.048.000,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	181.048.000,00	
	Persediaan yang digunakan	181.048.000,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	0,00	
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:		5.400.000,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	5.400.000,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	5.400.000,00	
	Persediaan yang digunakan	5.400.000,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	0,00	
9	Beban Natura, dengan rincian sebagai berikut:		56.274.600,00
	Persediaan Awal	0,00	
	Pembelian	56.274.600,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Persediaan yang tersedia untuk digunakan	56.274.600,00	
	Persediaan yang digunakan	56.274.600,00	
	Transfer Keluar	0,00	
	Persediaan Rusak / Kadaluausa	0,00	
	Jumlah Persediaan Akhir per 31 Desember 2024	0,00	



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.3.2.1.3 Beban Jasa-LO

30 September 2024

31 Desember 2023

Rp5.807.590.239,00

Rp6.906.609.115,00

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan jasa, termasuk pembayaran honorarium kegiatan. Beban jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.807.590.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.29
Beban Jasa – LO
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.2.1.59	Beban Tagihan Telepon	812.593,00	5.358.617,00
8.1.2.2.1.63	Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet/TV Berlangganan	6.051.200,00	35.889.633,00
8.1.2.2.1.4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	135.250.000,00	538.750.000,00
8.1.2.2.1.26	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.792.433.125,00	2.596.110.190,00
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	75.000.000,00	60.000.000,00
8.1.2.2.1.47	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	698.322.230,00	498.500.000,00
8.1.2.2.1.29	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.434.225.000,00	1.478.073.000,00
8.1.2.2.1.54	Beban Jasa Jalan/Tol	27.279.319,00	14.763.150,00
8.1.2.2.1.28	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	160.862.813,00
8.1.2.2.1.03	Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	133.100.000,00	138.200.000,00
8.1.2.2.1.62	Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	56.000.000,00	30.000.000,00
8.1.2.2.1.20	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	14.000.000,00	0,00
8.1.2.2.1.67	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	26.329.700,00	24.120.100,00
8.1.3.03.06	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	150.550.000,00	156.156.000,00
8.1.2.2.2.5	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	94.899.312,00	113.399.097,00
8.1.2.2.2.6	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Non ASN	4.174.560,00	6.671.340,00
8.1.2.2.2.7	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.218.200,00	8.339.175,00
8.1.2.2.8.14	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	355.416.000,00
8.1.2.5.1.1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	78.000.000,00
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai	0,00	0,00
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas	0,00	0,00
8.1.2.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	681.120.000,00	500.000.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.2.2.7	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	280.000.000,00	26.500.000,00
8.1.2.2.4.36	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	9.500.000,00
8.1.2.2.13.3	Beban Bimbingan Teknis	0,00	72.000.000,00
8.1.2.2.4.36	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.995.000,00	0,00
8.1.2.2.2.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	165.830.000,00	0,00
JUMLAH		5.807.590.239,00	6.906.609.115,00

Beban Jasa sampai dengan Per 31 Desember 2024 terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) jenis rekening. Jumlah pada masing-masing rekening tersebut sama dengan jumlah realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan tidak ada transaksi belanja jasa yang melewati periode tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 4.30
Rician Perhitungan Beban Jasa
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1.	Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		133.100.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	133.100.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
2.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		135.250.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	135.250.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
3.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial		14.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	14.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
4.	Beban Tagihan Telepon		812.593,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	812.593,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
5.	Beban Jasa Kawat / Faksimili / Internet/TV Berlangganaan		6.051.200,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	6.051.200,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
6.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		1.792.433.125,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	1.792.433.125,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
7.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		75.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	75.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

8.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara		698.322.230,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	698.322.230,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
9.	Beban Jasa Tenaga Ahli		1.434.225.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	1.434.225.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
10.	Beban Jasa Jalan/Tol		27.279.319,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	27.279.319,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
11.	Beban Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		56.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	56.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
12.	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		26.329.700,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	26.329.700,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
13.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		94.899.312,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	94.899.312,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
14.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		4.174.560,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	4.174.560,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
15.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		5.218.200,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	5.218.200,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
16.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		21.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	21.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
17.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		5.995.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	5.995.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
18.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika		150.550.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	150.550.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
19.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		681.120.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	681.120.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
20.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan		280.000.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	280.000.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
21.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		165.830.000,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	165.830.000,00	
- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	

**4.3.2.1.4 Beban Barang-LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp1.452.641.425,00 Rp2.130.034.144,00**

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang seperti makanan dan minuman serta pakaian. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo beban barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.452.641.425,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.31
Beban Barang – LO
Per 31 Desember 2024**

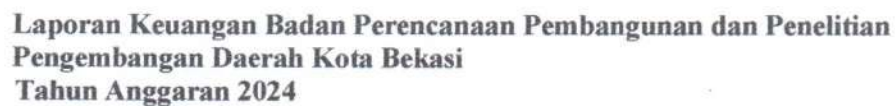
(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.1.5.02	Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat	561.051.700,00	543.693.500,00
8.1.2.1.5.30	Beban Barang Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	232.612.453,00	172.279.381,00
8.1.2.1.5.03	Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.113.500,00	83.180.000,00
8.1.2.1.5.14	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.250.000,00	23.265.000,00
8.1.2.1.4.15	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	150.155.000,00
8.1.2.1.4.26	Beban Barang Pakaian Olahraga	0,00	151.510.000,00
8.1.2.1.5.29	Beban Barang Non Persediaan	453.004.272,00	727.756.213,00
8.1.2.1.5.31	Beban Barang Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	157.937.000,00	167.985.250,00
8.1.2.1.5.01	Beban Barang Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	672.500,00	1.754.800,00
8.1.2.1.4.25	Beban Barang Pakaian Batik Tradisional	0,00	108.455.000,00
JUMLAH		1.452.641.425,00	2.130.034.144,00

**Tabel 4.32
Rician Perhitungan Beban Barang
Per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Beban Barang Makanan dan Minuman Rapat		561.051.700,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	561.051.700,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
2	Beban Barang Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		27.113.500,00



4.3.2.1.5	Beban Pemeliharaan-LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp168.125.000,00	Rp88.002.500,00

Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.125.000,00.

(dalam rupiah)

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi TA. 2024



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.3.2.409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	44.850.000,00	7.500.000,00
9.1.5.03.06	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	3.410.000,00
JUMLAH		168.125.000,00	88.002.500,00

Tabel 4.34
Rician Perhitungan Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH	
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		52.595.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	52.595.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		1.180.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	1.180.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
3	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer		69.500.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	69.500.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer		44.850.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	7.500.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	

Saldo akhir beban pemeliharaan didapat dari nilai belanja pemeliharaan sebesar Rp168.125.000,00

4.3.2.1.6 Beban Perjalanan Dinas-LO **31 Desember 2024** **31 Desember 2023**
Rp1.920.983.274,00 **Rp1.498.973.646,00**

Beban Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi perjalanan dinas. Beban Perjalanan Dinas diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

Saldo Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.920.983.274,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Tabel 4.35
Beban Perjalanan Dinas-LO per Jenis
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.1.2.4.1.1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	779.583.274,00	623.102.646,00
8.1.2.4.1.3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	213.090.000,00	214.650.000,00
8.1.2.4.1.4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	524.870.000,00	283.975.000,00
8.1.2.4.1.5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	403.440.000,00	377.246.000,00
JUMLAH		1.920.983.274,00	1.498.973.646,00

Tabel 4.36
Rician Perhitungan Beban Perjanan Dinas
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa		779.583.274,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	779.583.274,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		213.090.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	213.090.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		524.870.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	524.870.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		403.440.000,00
	- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024	403.440.000,00	
	- Outsanding SPJ sampai dengan 31 Desember 2024	0,00	

4.3.2.1.7 Beban Penyusutan-LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp1.091.217.761,21,00 Rp854.523.163,00

Beban Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Metode yang dipakai dalam menghitung penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa. Formula untuk menghitung Beban Penyusutan tiap tahun adalah nilai perolehan dibagi umur ekonomis suatu aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.091.217.761,2100 dan Rp854.523.163,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tabel 4.37
Beban Penyusutan-LO per Jenis
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.2.1.2.1.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	479.219.255,00	322.648.155,00
8.2.1.4.1.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	1.041.666,67	1.250.000,00
8.2.1.5.1.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor	22.986.700,00	29.260.127,00
8.2.1.5.2.0004	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	142.267.899,97	110.846.807,00
8.2.1.5.3.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit	283.133.163,90	234.511.447,00
8.2.1.5.3.0002	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	89.458.285,67	108.624.619,00
8.2.1.6.2.0006	Beban Penyusutan Alat Studio	12.963.650,00	12.445.000,00
8.2.1.6.1.0002	Beban Penyusutan Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	59.104.640,00	33.542.638,00
8.2.1.1.2.0003	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	1.042.500,00	1.042.500,00
JUMLAH		1.091.217.761,21	854.523.163,00

4.3.2.1.8 Beban Amortisasi-LO 31 Desember 2024 31 Desember 2023
Rp48.699.998,25,00 Rp48.699.998,25

Jumlah Beban Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.699.998,25 dan Rp48.699.998,25. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Tabel 4.38
Beban Amortisasi per Jenis
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
8.2.6.01.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	48.699.998,25	48.699.998,25
JUMLAH		48.699.998,25	48.699.998,25



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

4.3.3	Surplus/ Defisit -	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	LO	Rp(30.314.624.785,46)	Rp(30.570.169.558,25)

Pada Laporan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Bekasi tercatat mengalami Defisit-LO sebesar Rp(30.314.624.785,46) yang merupakan hasil dari selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2024. Sehingga nilai defisit-LO sebesar Rp(30.314.624.785,46) yang terjadi selama per 31 Desember 2024.

4.4. Penjelasan ata Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi adanya perubahan kebijakan.

4.4.1.	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp5.516.068.619,68	Rp3.833.504.130,05

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp5.516.068.619,68 dan Rp3.833.504.130,05.

4.4.2.	Surplus/Defisit-LO	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp(30.314.624.785,46)	Rp(30.570.169.558,25)

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(30.314.624.785,46) dan Rp(30.570.169.558,25). Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

4.4.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
		Rp(100.950.015,00)	Rp2.083.328.797,88

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(100.950.015,00) dan Rp2.083.328.797,88.



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi nilai persediaan	0,00
2	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	0,00
3	Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar	(100.950.015,00)
	Jumlah	(100.950.015,00)

Penjelasan atas masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,00
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan Rp. 0,00
3. Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar sebesar (100.950.015,00)

Koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar terjadi akibat adanya pos-pos yang belum tercatat atau tidak seharusnya tercatat pada neraca per 31 Desember 2024. Adapun nilai koreksi ekuitas awal akibat kesalahan mendasar untuk masing-masing akun dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 4.40
Koreksi Ekuitas Akibat Kesalahan Mendasar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	(15,00)	1.292.160.678,33
2	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	(155.489.826,00)
3	Koreksi Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
4	Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	0,00
5	Koreksi Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
6	Koreksi Penyisihan Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
7	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
8	Koreksi Investasi Permanen (LK Audit)	0,00	0,00
9	Koreksi Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi – TGR	0,00	0,00
10	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
11	Koreksi SDP (SAT/SPP)	0,00	0,00
12	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
13	Koreksi Utang Bunga	0,00	0,00
14	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
15	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
16	Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	0,00
17	Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
18	Koreksi Piutang	0,00	0,00
19	Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
20	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
21	Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
23	Koreksi Utang Jk Panjang	0,00	0,00
24	Transfer Keluar Kas	0,00	0,00
25	Transfer Keluar Piutang Pendapatan	0,00	0,00
26	Transfer Keluar Piutang Lainnya	0,00	0,00
27	Transfer Keluar Penyisihan Piutang	0,00	0,00
28	Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
29	Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
30	Transfer Keluar Aset Tetap	(136.525.909,00)	(409.389.675,00)



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
31	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35.575.909,00	0,00
32	Transfer Keluar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
33	Transfer Keluar Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
34	Transfer Keluar Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
35	Transfer Keluar Aset Lain-lain	0,00	0,00
36	Transfer Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
37	Transfer Keluar Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi –TGR	0,00	0,00
38	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
39	Transfer Keluar Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
40	Transfer Masuk Kas	0,00	0,00
41	Transfer Masuk Piutang Pendapatan	0,00	0,00
42	Transfer Masuk Piutang Lainnya	0,00	0,00
43	Transfer Masuk Penyisihan Piutang	0,00	0,00
44	Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
45	Transfer Masuk Persediaan	0,00	705.000,00
46	Transfer Masuk Aset Tetap	0,00	2.742.377.000,00
47	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
48	Transfer Masuk Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
49	Transfer Masuk Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
50	Transfer Masuk Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
51	Transfer Masuk Aset Lain-lain	0,00	0,00



**Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
52	Transfer Masuk Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
53	Transfer Masuk Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi-TGR	0,00	0,00
54	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
55	Transfer Masuk Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
56	Transfer Keluar Lainnya	0,00	0,00
57	Transfer Masuk Lainnya	0,00	0,00
58	Koreksi Mengurangi Pencatatan Aset Lainnya	0,00	0,00
59	Koreksi Kas Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH		(100.950.015,000)	2.083.328.797,88

4.4.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024

Rp4.884.933.315,22

31 Desember 2023

Rp5.516.068.619,68

Nilai ekuitas akhir untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp4.884.933.315,22 dan Rp5.516.068.619,68.

BAB V

PENJELASAN PENTING LAINNYA

Penjelasan penting lainnya mengungkapkan peristiwa perubahan struktur kepemimpinan dan/atau transaksi yang tidak termasuk anggaran SKPD tetapi dilaksanakan oleh SKPD seperti Perubahan Struktur Kepemimpinan dan transaksi sumber dana Non APBD seperti Hibah, CSE dan Sumbangan dari Instansi lain dari masyarakat.

5.1. Perubahan Struktur Kepemimpinan atau Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi mengalami perubahan kelembagaan organisasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi. Akan tetapi sampai tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 belum ada pengukuhan kelembagaan tersebut. Sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 masih menggunakan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

5.2. Hibah/CSR dan Sumbangan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki pendapatan berupa hibah/CSR

5.3. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Setelah tanggal Pelaporan pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 tidak ada kejadian yang mempengaruhi isi Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan.



**BAB VI
PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2024.

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi per 31 Desember 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sudah dapat dipenuhi sesuai alokasi anggaran. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan data-data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan.

Demikian laporan keuangan ini dibuat. Semoga penyusunan laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Bekasi, 26 Mei 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah



Drs. Dinar Faizar Badar
NIP. 19710115 199003 1 002